

# KARAKTERISTIK DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH PERIODE 2022-2024

<sup>1</sup>Safira Rahmi Adiyar\*, <sup>2</sup> Provita Wijayanti

<sup>1,2</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
safirarahmiad@gmail.com

## ABSTRAK

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menyertakan kesehatan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi yang diukur menggunakan rasio fleksibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan moderated regression analysis (MRA). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022-2024. Sampel penelitian menggunakan sampling jenuh. Data yang digunakan berupa LRA dan Neraca yang diperoleh melalui LHP yang diterbitkan BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat berpengaruh negatif. Namun, kesehatan keuangan mampu memperkuat pengaruh positif belanja modal dan memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan. Hal ini memberikan implikasi bahwa dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat dapat mengoptimalkan efektivitas belanja modal dan/ataupun mengurangi dampak negatif dari ketergantungan fiskal. Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah sampel dan tahun pengamatan, data yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup periode setelah pandemi COVID-19. Kemudian, penelitian ini menyarankan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pengalokasian belanja daerah dan bagi Pemerintah Pusat untuk mendorong kebijakan yang memperkuat kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.*

**Kata Kunci:** *Belanja Modal, Kesehatan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan*

---

**ABSTRACT**

*Abstract should also be written in English, typed after the Bahasa Indonesia version of the abstract. Author(s) are suggested to highlight five things in the abstract, i.e. background, objectives, methods or framework, results or important conclusions, and recommendations. The abstract should consist of approximately 300 words. Unusual abbreviations and confusing terms should be avoided in the abstract. Maximum five key words should be provided after the abstract. If the article (full text) is in English, the abstract may be only one (in English). It is written in one paragraph. The purpose of this study is to examine the effect of capital expenditure and dependency level on the financial performance of local governments. This research includes the financial health of local governments as a moderating variable, measured using the flexibility ratio. A quantitative approach was employed with multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). Data processing was conducted using IBM SPSS Statistics version 25. The population in this study consists of regencies and municipalities in Central Java Province for the period 2022–2024. The sample was determined using a saturated sampling technique. The data used include the Budget Realization Report (LRA) and the Balance Sheet obtained from Audit Reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK). The results of the study show that capital expenditure has no effect on the financial performance of local governments, while fiscal dependency on central government transfers has a negative effect. However, financial health strengthens the positive effect of capital expenditure and weakens the negative effect of fiscal dependency on financial performance. This implies that when local governments have a healthy financial condition, they are able to optimize the effectiveness of capital expenditure and/or reduce the adverse impacts of fiscal dependency. This study is limited by the number of samples and the observation period, as the data only cover the post-COVID-19 period. Furthermore, the study suggests that local governments should pay greater attention to budget allocation, while the central government should encourage policies that strengthen local government independence in implementing fiscal decentralization.*

**Keywords:** *Capital Expenditure, Financial Health, Financial Performance, Local Government, Dependency Level*

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia menapaki era otonomi daerah yang baru. Hal ini ditunjukkan melalui penyerahan kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Penyerahan kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung implikasi fiskal yang signifikan. Desentralisasi fiskal menjadi elemen kunci untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1999, sebagai upaya penyempurnaan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembentukan UU tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan prinsip *money follow function*, yaitu pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. UU tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam membangun kapasitas fiskal otonom.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara lebih independen. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin besar pula ruang gerak dan peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, di tahun 2024 PAD hanya berkontribusi sebesar 28,94% dari total pendapatan daerah sedangkan pendapatan transfer sebesar 64,65% dari total pendapatan daerah. Pola ini juga terlihat konsisten pada tahun-tahun sebelumnya: 64,64% pada tahun 2023, 64,87% pada tahun 2022, dan 66,07% pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah daerah menggantungkan keberlangsungan fiskalnya pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memperlihatkan masih tingginya tingkat ketergantungan, yang mana dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah digunakanlah kinerja keuangan. Menurut Halim (2021), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti PAD, dana perimbangan, dan belanja modal (Digdowiseiso et al., 2022). Belanja modal berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur daerah, yang melibatkan alokasi anggaran untuk memperoleh aset jangka panjang, baik berupa aset berwujud maupun tak berwujud yang memiliki nilai manfaat yang panjang, sementara tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat menunjukkan belum optimalnya PAD sebagai sumber pendapatan dominan dalam APBD.

Kondisi kesehatan keuangan juga menjadi aspek penting dalam mendukung kinerja keuangan daerah (Muñoz et al., 2016). Pemerintah daerah dengan keuangan yang sehat mampu memenuhi kewajiban, melunasi utang, serta tetap memprioritaskan kebutuhan pembangunan. Kesehatan keuangan pemerintah daerah juga mempengaruhi alokasi anggaran pemerintah, sehingga berdampak pada alokasi belanja modal. Kesejahteraan keuangan pemerintah daerah turut memperkuat ketahanan fiskalnya, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih efektif mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian kondisi keuangan di masa depan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Oleh karena itu, kesehatan keuangan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengurangi ketergantungan fiskal yang pada akhirnya akan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan otonomi daerah. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan karakteristik Pemerintah daerah dan cenderung mudah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transfer pusat dapat berdampak positif karena memberikan stabilitas fiskal, menjamin pembiayaan pembangunan, dan membantu daerah dengan kapasitas PAD yang rendah. Namun, penelitian lain menemukan bahwa ketergantungan tinggi justru berdampak

negatif karena menurunkan insentif daerah untuk menggali PAD dan melemahkan kemandirian fiskal. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang menyatakan ketergantungan fiskal tidak memengaruhi kinerja keuangan selama dana transfer dikelola secara efektif dan efisien. Merespons inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengevaluasi pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022-2024 dengan menggunakan tingkat kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2022) merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan guna meneliti suatu populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan. Sampel penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota dengan periode observasi tahun 2022–2024.

Tabel 1 Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	35
Tahun Pengamatan (2022-2024)	3
Total Pemerintah Daerah-Tahun	105
Data Outlier	19
Total sampel	86

Sumber: Data diolah, 2025

Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK. Variabel yang dikaji meliputi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen (Y), Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan sebagai variabel independen (X), dan Tingkat Kesehatan Keuangan sebagai variabel moderasi (Z). Belanja modal diukur dari proporsi gabungan seluruh realisasi belanja yang dialokasikan untuk mengadaan aset tetap, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya dibandingkan dengan total belanja daerah. Tingkat ketergantungan diukur dengan rasio ketergantungan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio ini dapat mencerminkan kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya. Dan tingkat kesehatan keuangan diukur dengan menggunakan rasio fleksibilitas yang sama dengan yang digunakan Ritonga (2014).

Analisis menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri atas uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, *Moderating Regression Analysis* (MRA), uji *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Rumus	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Mengukur kemandirian fiskal	$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi} + \text{Pinjaman}}$	Rasio
Belanja Modal (X1)	Mengukur proporsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja produktif	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$	Rasio
Tingkat Ketergantungan (X2)	Sejauh mana Pemda bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat	$\frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi PAD}}$	Rasio
Kesehatan Keuangan (Z)	Mengukur kemampuan Pemda menjalankan tanggung jawabnya.	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Utang}}$ Hasil dari perhitungan di atas kemudian diterjemahkan untuk memperoleh indeks kesehatan keuangan dengan rentang 0-1	Rasio
		$\frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$	

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Deskriptif

Hasil uji analisis statistik deskriptif yang dilampirkan pada Tabel 1 menunjukkan variasi signifikan dalam karakteristik keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1240 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 0,03814. Nilai minimum adalah sebesar 0,0482 diperoleh dari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 0,2708 dari Kabupaten Boyolali tahun 2022. Tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,4238 dan simpangan baku (*standard deviation*) 0,84207. Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 1,8009 diperoleh dari Kabupaten Boyolali tahun 2023 dan 5,8905 diperoleh dari Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2355 dan simpangan baku (*standard deviation*) 0,06463. Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0,1298 dan 0,4336. Kinerja keuangan terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Wonogiri tahun 2023 dan tertinggi ditunjukkan oleh Kota Salatiga tahun 2024. Kesehatan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2410 dengan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 0,18539. Nilai minimum sebesar 0 ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 1 ditunjukkan oleh Kabupaten Klaten tahun 2022.

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	92	0.0482	0.2708	0.1240	0.03814
Tingkat Ketergantungan	92	1.8009	5.8905	3.4238	0.84207
Kinerja Keuangan	92	0.1298	0.4336	0.2355	0.06463
Kesehatan Keuangan	92	0.00	1.00	0.2410	0.18539
Valid N ( <i>listwise</i> )	92				

Sumber: Data diolah, 2025

### Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada hasil uji normalitas menggunakan *One Kolmogorov Smirnov* (K-S), diperoleh nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini juga didukung oleh grafik histogram dan Normal Probability (P-P) Plot yang memperlihatkan distribusi data simetris dan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

Selanjutnya, uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,962 yang berada di antara batas  $dU = 1,7767$  dan  $4-dU = 2,2233$ , sehingga model bebas dari autokorelasi. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik menyebar secara acak tanpa pola tertentu, sementara uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik, sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

### Moderated Regression Analysis

Digunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan dengan kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi yang kemudian digambarkan melalui model persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 \times Z) + \beta_4 (X_2 \times Z) + \varepsilon$$

Y adalah variabel dependen (Kinerja Keuangan),  $\alpha$  adalah konstanta,  $X_1$  adalah variabel independen (Belanja Modal),  $X_2$  adalah variabel independen (Tingkat Ketergantungan), Z adalah kesehatan keuangan,  $X_1 \times Z$  adalah interaksi belanja modal dan kesehatan keuangan, dan  $X_2 \times Z$  adalah interaksi tingkat ketergantungan.

Hasil regresi menunjukkan konstanta -0,175 artinya jika variabel independen belanja modal dan tingkat ketergantungan bernilai konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen kinerja keuangan diprediksi -0,175. Belanja modal berpengaruh tetapi tidak signifikan (Sig. 0,017, 0,290 > 0,05), tingkat ketergantungan berpengaruh negatif signifikan (Sig. -1,021, 0,000 < 0,05), tingkat kesehatan keuangan memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan (Sig. 0,282, 0,000 < 0,05), dan tingkat

kesehatan keuangan melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan (Sig.  $-0,189, 0,018 < 0,05$ ).

### Uji Simultan

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian tanpa interaksi variabel moderasi menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,05$  dan Fhitung  $1522,697 > Ftabel 3,947$ , sehingga belanja modal dan tingkat ketergantungan memiliki dampak terhadap kinerja keuangan. Kemudian hasil pengujian dengan interaksi variabel moderasi juga menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 \leq 0,05$  dan Fhitung  $761,708 > Ftabel 2,473$ . Artinya, belanja modal, tingkat ketergantungan, serta kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan variasi kinerja keuangan daerah.

### Uji Koefisien Determinasi.

Dari hasil uji tanpa interaksi variabel moderasi menunjukkan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,971. Artinya, belanja modal dan tingkat ketergantungan mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 97,1%, sementara sisanya 2,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setelah memasukkan kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi, nilai adjusted  $R^2$  meningkat menjadi 0,977. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal, tingkat ketergantungan, dan kesehatan keuangan bersama-sama dapat menjelaskan variasi kinerja keuangan sebesar 97,7%, sedangkan 2,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 4 Ringkasan Uji Hipotesis

Variable	Coeff.	T-Stat.	Prob.
X1	0.017	-5.728	0.000
X2	-1.021	1.065	0.290
Z	0.008	-57.395	0.000
X1.Z	0.282	0.382	0.704
X2.Z	-0.189	3.834	0.000
R2	0.978	-2.403	0.018
Adj. R2	0.977		
F-stat	761.708		
Prob(F-stat.)	0.000		

### Pembahasan

#### Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini konsisten dengan temuan Fernandes & Putri (2022), Padang & Padang (2023), dan Wahyudin (2020). Belanja modal pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang berupa infrastruktur, gedung pemerintahan, maupun sarana publik yang diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan PAD. Namun, manfaat ekonominya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, sehingga dampaknya sulit ditangkap oleh

penelitian dengan horizon waktu pendek. Selain itu, efektivitas belanja modal sangat menentukan, sebab tidak semua belanja dialokasikan pada aset produktif yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah.

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam praktiknya, terdapat potensi konflik kepentingan antara masyarakat (prinsipal) sebagai pihak yang memberikan mandat dengan pemerintah daerah (agen) sebagai pihak yang mengelola sumber daya publik. Pemerintah daerah sebagai agen tidak selalu mengalokasikan belanja modal berdasarkan orientasi ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan politis, kapasitas pengelolaan, dan arah perencanaan. Akibatnya, realisasi belanja modal tidak sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi peningkatan kinerja keuangan daerah.

### **Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2024), Digdowiseiso et al. (2022), dan Aysiah (2022). Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menggali sumber PAD. Apabila sumber pendanaan pemerintah daerah terlalu bergantung kepada transfer pusat, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan di daerahnya akan terganggu karena sebagian besar belanja daerah terikat pada aturan penggunaan dana transfer. Akibatnya, ruang fiskal untuk melakukan inovasi kebijakan menjadi terbatas sehingga kinerja keuangan tidak tumbuh optimal.

Tingginya tingkat ketergantungan juga mengindikasikan bahwa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah belum diimplementasikan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah tetapi juga kualitas aparatur, transparansi sistem, dan dukungan regulasi. Penting bagi Pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang tepat kepada daerah antara lain melalui regulasi dan insentif yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan aparatur, dan penyediaan sistem informasi terintegrasi. Selain itu penting adanya mekanisme pembagian hasil pajak yang adil antara pusat dan daerah untuk mendorong tercapainya kemandirian fiskal.

### **Tingkat Kesehatan Keuangan Memoderasi Hubungan Antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kesehatan Keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan memenuhi kewajibannya (Kooij & Groot, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan. Daerah dengan kondisi keuangan yang sehat memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai investasi produktif. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kesehatan keuangan yang rendah memiliki fleksibilitas anggaran yang sempit karena pendapatannya difokuskan untuk

belanja pegawai dan kewajiban rutin lainnya. Hal tersebut membuat belanja modal menjadi tidak optimal karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan, pengembangan, maupun pengelolaan aset yang dibangun. Meskipun belanja modal dilakukan, dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak akan signifikan.

### **Tingkat Kesehatan Keuangan Memoderasi Hubungan Antara Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi mampu melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan. Kondisi keuangan yang sehat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya. Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang sehat mampu menjaga stabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi dana transfer. Meskipun tingkat ketergantungan tinggi, dengan adanya kemampuan untuk mengendalikan belanja rutin dan kapasitas untuk memanfaatkan sumber pendapatan di luar transfer pusat, risiko penurunan kinerja keuangan akibat ketergantungan dapat diminimalisasi.

## **4. KESIMPULAN**

Analisis menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan berpengaruh negatif. Tingkat kesehatan keuangan mampu memperkuat pengaruh positif pengaruh belanja modal sekaligus melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan daerah. Namun penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan berupa obyek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024 sehingga tidak bisa menangkap karakteristik ekonomi, sosial, dan fiskal di daerah lain di luar penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga tidak dapat menangkap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang karena periode penelitian yang relatif singkat. Disarankan agar penelitian mendatang untuk memasukkan variabel lain, cakupan wilayah kajian, serta periode waktu untuk meningkatkan akurasi serta validitas hasil analisis. Implikasi praktis dari penelitian ini ditunjukkan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan publik untuk memberikan perhatian lebih terhadap komponen pengalokasian belanja modal guna meningkatkan produktivitas daerah yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kinerja keuangan dan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang tepat kepada daerah untuk meningkatkan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui regulasi dan insentif yang memadai.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, penulisan, dan juga pendukung perjalanan dalam menulis penelitian ini.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aysiah, I. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4(6).
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, A. M. (2024). The Characteristics And Financial Performance Of Local Governments In Indonesia: The Moderating Role Of Financial Health Level. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 85–94. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Halim, K. I. (2021). Pengaruh Leverage, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 164-173. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.348>
- Kooij, J., & Groot, T. (2021). Towards a comprehensive assessment system of local government fiscal health. *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie*, 95(7/8), 233–244. <https://doi.org/10.5117/mab.95.67693>
- Muñoz, L. A., Bolívar, M. P. R., & Hernández, A. M. L. (2016). Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures. *American Review of Public Administration*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.